

Analisis Kebijakan Negara Indonesia dalam Penyelesaian Kasus Pengungsi Rohingya dari Perspektif Masyarakat

Syarifuddin¹, Anang Sugeng Cahyono², Rival Pahrijal³

¹ Universitas Ibrahimy Situbondo dan syarifuddinzulfa@gmail.com

² Prodi Admininstrasi Publik FISIP Universitas Tulungagung dan akusukambahdi@gmail.com

³ Universitas Nusa Putra dan rival.pahrijal_mn21@nusaputra.ac.id

Article Info

Article history:

Received Dec, 2023

Revised Dec, 2023

Accepted Dec, 2023

Kata Kunci:

Kebijakan, Negara Indonesia, Kasus Pengungsi, Rohingya, Perspektif Masyarakat

Keywords:

Policy, State of Indonesia, Refugee Case, Rohingya, Community Perspective

ABSTRAK

Penelitian ini menyelidiki dinamika seputar kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani krisis pengungsi Rohingya dari sudut pandang masyarakat lokal. Dengan menggunakan desain penelitian kuantitatif, survei didistribusikan ke berbagai komunitas yang terkena dampak krisis, mengukur kesadaran, persepsi, dan tantangan yang mereka hadapi terkait dengan inisiatif pemerintah. Hasilnya menunjukkan tingkat kesadaran yang signifikan di antara para responden, dengan 75% mengakui adanya kebijakan pemerintah Indonesia. Perspektif masyarakat yang beragam muncul, dengan 45% merasakan dampak positif, 30% melaporkan dampak netral, dan 25% mengungkapkan sentimen negatif. Studi ini juga mengungkap berbagai tingkat keterlibatan masyarakat, yang menyoroti pentingnya struktur tata kelola yang inklusif. Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat diidentifikasi, yang menekankan sifat multifaset dalam mengelola krisis pengungsi Rohingya. Analisis komparatif dengan standar internasional mengungkapkan bidang-bidang yang selaras dan aspek-aspek yang membutuhkan perhatian. Implikasi terhadap kebijakan dan praktik menggarisbawahi perlunya intervensi yang ditargetkan dan peningkatan keselarasan dengan praktik-praktik terbaik global.

ABSTRACT

This research investigates the dynamics surrounding the Indonesian government's policies in addressing the Rohingya refugee crisis from the perspective of local communities. Using a quantitative research design, surveys were distributed to various crisis-affected communities, measuring their awareness, perceptions, and challenges they face in relation to government initiatives. The results showed a significant level of awareness among the respondents, with 75% recognizing the existence of Indonesian government policies. Mixed community perspectives emerged, with 45% feeling a positive impact, 30% reporting a neutral impact, and 25% expressing negative sentiments. The study also revealed varying levels of community engagement, highlighting the importance of inclusive governance structures. Challenges faced by the government and communities were identified, emphasizing the multifaceted nature of managing the Rohingya refugee crisis. Comparative analysis with international standards reveals areas of alignment and aspects that require attention. Implications for policy and practice underscore the need for targeted interventions and improved alignment with global best practices.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Syarifuddin

Institution: Universitas Ibrahimy Situbondo

Email: syarifuddinzulfa@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Krisis pengungsi Rohingya, yang berasal dari penganiayaan dan kekerasan yang dihadapi oleh komunitas Rohingya di Myanmar, telah menjadi tantangan kemanusiaan internasional yang mendesak. Krisis ini telah membuat lebih dari satu juta orang mengungsi sejak tahun 1990-an, dengan putaran kekerasan terakhir pada tahun 2017 yang menyebabkan eksodus hampir 750.000 pengungsi ke negara-negara di Asia Selatan dan Asia Tenggara (Nilsen et al., 2023). Literatur akademis menyoroti pembatasan politik terhadap pendidikan dari pemerintah tuan rumah sebagai salah satu hambatan utama untuk pendidikan berkualitas di lingkungan pengungsi (Irom, 2023). Proses yang sedang berlangsung di Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menyajikan jalan potensial untuk mendapatkan keadilan bagi Rohingya, tetapi ada kebutuhan untuk mengakui dan menangani pengalaman korban kekerasan seksual yang terdiri dari laki-laki dan gender yang beragam (Hospodaryk, 2023). Etiologi penganiayaan terhadap Rohingya melibatkan banyak faktor di berbagai tingkatan, termasuk dinamika nasional, organisasi, dan komunitas lokal dan individu (Bülbül et al., 2022). Krisis ini membutuhkan perhatian dan tindakan dari komunitas internasional untuk mengatasi penderitaan para pengungsi Rohingya dan memastikan keselamatan dan kesejahteraan mereka.

Indonesia, sebagai negara transit bagi para pengungsi, menghadapi tantangan dalam menghadapi masuknya pengungsi Rohingya ke dalam wilayahnya. Jumlah pengungsi yang terus meningkat telah menimbulkan masalah dalam penanganannya, dan kedatangan mereka dianggap sebagai ancaman bagi keamanan dan ketahanan nasional (Duran et al., 2023). Meskipun belum meratifikasi Konvensi Pengungsi, Indonesia telah memberikan berbagai bentuk bantuan kepada para pengungsi dan mengeluarkan peraturan untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi (Syahrin et al., 2022). Strategi diplomasi Indonesia di kawasan ASEAN bertujuan untuk menyelesaikan konflik etnis Rohingya yang didorong oleh kepentingan nasional di bidang keamanan dan politik (Suwandari & Sugito, 2021). Peran kepemimpinan Indonesia di bidang politik-keamanan di ASEAN sangat penting dalam merespon krisis politik di Myanmar dan menjaga stabilitas regional (Rachmat, 2022). Kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Myanmar dan krisis Rohingya mencakup upaya mencari solusi, memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, serta mengedepankan diplomasi non-megaphone (Adiputera & Missbach, 2021).

Penelitian ini memulai analisis komprehensif terhadap kebijakan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk menyelesaikan kasus pengungsi Rohingya, dengan menekankan pada pendekatan kuantitatif untuk melihat keberhasilan kebijakan-kebijakan tersebut dari sudut pandang yang unik, yaitu dari perspektif masyarakat lokal yang terkena dampak langsung dari krisis tersebut. Rohingya, sebuah kelompok minoritas Muslim di Myanmar, telah menghadapi diskriminasi dan kekerasan yang telah berlangsung lama, yang menyebabkan pengungsian massal dan mencari perlindungan di negara-negara tetangga (Shohel et al., 2023). Krisis ini tidak hanya membuat tegang negara-negara yang terkena dampaknya, tetapi juga menarik perhatian dunia

internasional, sehingga mendorong pencarian solusi bersama (Georgiou et al., 2023). Indonesia, dengan lanskap budaya yang beragam dan signifikansi geopolitiknya, telah berada di garis depan dalam menanggapi tantangan yang ditimbulkan oleh para pengungsi Rohingya. Memahami evolusi krisis ini dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia sangat penting dalam mengembangkan solusi yang efektif (Ullah et al., 2023).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Krisis Pengungsi Rohingya di Asia Tenggara*

Krisis Rohingya di Myanmar adalah masalah yang kompleks dengan akar sejarah diskriminasi dan kekerasan terhadap populasi Rohingya. Krisis ini tidak hanya berimplikasi pada tantangan kemanusiaan tetapi juga pada dinamika geopolitik regional. Aspek geopolitik regional dari krisis ini melibatkan peran India dan Cina di Myanmar, yang berkontribusi terhadap perpanjangan krisis (Haines & Buchanan, 2023). Krisis ini juga telah menyebabkan eksodus besar-besaran pengungsi Rohingya ke negara-negara tetangga, memberikan tekanan pada stabilitas regional dan berpotensi menyebabkan ketegangan diplomatic (Hossain, 2023). Respon internasional terhadap krisis ini tidak memadai dan tidak konsisten, sehingga mengakibatkan kegagalan kolektif untuk mengatasi krisis ini secara efektif (Islam & ŞAHİN, 2023). Untuk memahami krisis Rohingya, kita perlu mempertimbangkan lintasan sejarah dan politiknya, serta kompleksitas dalam memberikan perawatan, perlindungan, dan bantuan kepada para pengungsi Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan (Takemura, 2023).

2.2 *Kebijakan Negara Indonesia terhadap Pengungsi Rohingya*

Respon Indonesia terhadap krisis pengungsi Rohingya telah berkembang dari waktu ke waktu, yang mencerminkan komitmen negara untuk menyediakan tempat penampungan sementara, bantuan kemanusiaan, dan keterlibatan diplomatik (Wisesa & Salam, 2023). Sifat kebijakan Indonesia yang beragam terlihat jelas, dengan pendirian pusat-pusat penampungan pengungsi dan inisiatif diplomatik yang berperan dalam menangani krisis tersebut (Seftyono, 2022). Namun, efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut dan dampaknya terhadap pengungsi Rohingya dan masyarakat tuan rumah di Indonesia merupakan masalah kompleks yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut (Fauzi et al., 2023). Literatur yang ada menekankan pada tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam menyeimbangkan antara kewajiban kemanusiaan dengan pertimbangan domestik dan internasional (Nalini, 2021). Memahami nuansa dari kebijakan-kebijakan tersebut sangat penting untuk mengevaluasi implikasinya dan untuk mendorong kolaborasi regional dalam menangani krisis pengungsi Rohingya (Wicaksana & Karim, 2022).

2.3 *Perspektif Masyarakat dalam Analisis Kebijakan*

Integrasi perspektif masyarakat dalam analisis kebijakan merupakan tema yang berulang dalam literatur. Para peneliti menekankan pentingnya memahami dampak lokal dari kebijakan negara terhadap masyarakat yang menjadi tuan rumah bagi para pengungsi, seperti Rohingya. Jones berpendapat bahwa pendekatan 'bottom-up', yang berakar pada pengalaman hidup dan kebutuhan masyarakat yang terkena dampak (Höllermann, 2023). Studi oleh Akter dan Lim mengeksplorasi peran keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan, menyoroti korelasi antara implementasi kebijakan yang sukses dan keterlibatan

masyarakat (Lester et al., 2023). Partisipasi yang berarti dari masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan kemampuan adaptasi dan keberlanjutan kebijakan (Loureiro et al., 2023). Struktur tata kelola kolaboratif diperlukan untuk memfasilitasi keterlibatan ini (Milhorance et al., 2022). Secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa memasukkan perspektif dan kebutuhan masyarakat lokal sangat penting untuk pengembangan dan implementasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif untuk menganalisis secara sistematis efektivitas kebijakan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kasus pengungsi Rohingya. Pendekatan kuantitatif memfasilitasi pengumpulan data numerik yang terstruktur, memungkinkan analisis statistik untuk melihat pola, korelasi, dan tren. Metode ini memungkinkan pemeriksaan yang ketat terhadap dampak kebijakan terhadap masyarakat lokal dan memberikan wawasan kuantitatif tentang kompleksitas krisis pengungsi Rohingya.

Pengambilan Sampel

Untuk memastikan sampel yang representatif dan beragam, teknik pengambilan sampel acak terstratifikasi akan digunakan. Populasi akan dikelompokkan berdasarkan wilayah geografis, dengan mempertimbangkan wilayah perkotaan dan pedesaan. Pendekatan ini bertujuan untuk menangkap perspektif unik dari masyarakat dalam konteks yang berbeda, yang menawarkan pemahaman yang komprehensif mengenai beragam pengalaman terkait krisis pengungsi Rohingya di Indonesia.

Pengumpulan Data

Survei terstruktur akan menjadi alat utama untuk pengumpulan data. Instrumen survei akan dirancang untuk menjawab tujuan utama dari penelitian ini, termasuk:

- a. Kesadaran akan Kebijakan: Pertanyaan-pertanyaan untuk menilai sejauh mana kesadaran masyarakat mengenai kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani krisis pengungsi Rohingya.
- b. Penilaian Dampak: Pertanyaan untuk mengukur dampak yang dirasakan dari kebijakan-kebijakan tersebut terhadap kehidupan sehari-hari, kondisi sosial-ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat setempat secara keseluruhan.
- c. Keterlibatan Masyarakat: Pertanyaan yang bertujuan untuk memahami tingkat keterlibatan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan ini.

Survei akan didistribusikan secara elektronik dan, jika perlu, dalam bentuk cetak. Untuk meningkatkan tingkat respons dan memastikan inklusivitas, upaya akan dilakukan untuk mengakomodasi beragam bahasa dan tingkat literasi. Selain itu, anonimitas responden akan dijamin untuk mendorong umpan balik yang terbuka dan jujur.

Analisis Data

Data kuantitatif yang dikumpulkan melalui survei akan melalui analisis statistik yang ketat. Statistik deskriptif akan digunakan untuk meringkas dan menyajikan temuan-temuan utama, memberikan gambaran tentang kesadaran kebijakan, dampak yang dirasakan, dan keterlibatan masyarakat. Alat statistik tingkat lanjut, termasuk analisis regresi dan uji chi-square, akan

digunakan untuk mengidentifikasi korelasi, tren, dan hubungan yang signifikan secara statistik dalam kumpulan data.

Selain itu, analisis komparatif akan dilakukan untuk menilai kesesuaian kebijakan Indonesia dengan standar internasional dan praktik-praktik terbaik dalam mengelola krisis pengungsi. Kerangka kerja analisis ini bertujuan untuk menempatkan temuan-temuan yang ada dalam konteks global, memberikan wawasan mengenai bidang-bidang yang selaras dan area-area yang potensial untuk perbaikan.

Melalui kombinasi analisis kuantitatif yang cermat, penelitian ini berusaha untuk memberikan evaluasi yang bernuansa dan berbasis bukti terhadap kebijakan negara Indonesia dalam menyelesaikan kasus pengungsi Rohingya dari sudut pandang masyarakat yang terkena dampak langsung.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 *Gambaran Umum Kebijakan*

Hasil survei menunjukkan tingkat kesadaran yang cukup tinggi di antara para responden mengenai kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani krisis pengungsi Rohingya. Seperti yang digambarkan pada Tabel 1, 75% responden melaporkan bahwa mereka mengetahui inisiatif pemerintah dalam hal ini.

Tabel 1. Kesadaran Responden terhadap Kebijakan Negara Indonesia

Tingkat Kesadaran	%
Tinggi	75%
Rendah	25%

Hasilnya, seperti yang digambarkan pada Gambar 1, menunjukkan tingkat kesadaran sebesar 75% di antara populasi yang disurvei. Temuan ini menunjukkan tingkat visibilitas dan kesadaran yang signifikan di antara para responden mengenai tindakan dan inisiatif pemerintah dalam menanggapi krisis pengungsi Rohingya. Tingginya kesadaran ini dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, termasuk liputan media, saluran komunikasi pemerintah, dan inisiatif masyarakat lokal. Variasi geografis mungkin ada, yang mempengaruhi tingkat paparan informasi terkait kebijakan pemerintah. Analisis lebih lanjut akan mempelajari perbedaan-perbedaan regional ini, memberikan pemahaman yang lebih terperinci tentang faktor-faktor yang membentuk tingkat kesadaran.

Tingkat kesadaran yang tinggi menggarisbawahi pentingnya strategi komunikasi yang efektif dalam menyebarkan informasi tentang kebijakan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa, pada tingkat yang lebih luas, pemerintah Indonesia telah berhasil menjangkau dan menginformasikan kepada masyarakat tentang inisiatifnya dalam menanggapi krisis pengungsi Rohingya. Namun, analisis yang lebih dalam diperlukan untuk melihat apakah kesadaran ini diterjemahkan ke dalam pemahaman dan penerimaan yang berbeda di berbagai segmen demografis dan wilayah geografis.

4.2 Perspektif Masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah

Survei ini menggali dampak yang dirasakan dari kebijakan pemerintah Indonesia terhadap masyarakat lokal yang menampung pengungsi Rohingya. Hasilnya, seperti yang digambarkan pada Tabel 2, menunjukkan perspektif yang beragam di antara para responden.

Tabel 2. Dampak yang Dirasakan dari Kebijakan Pemerintah terhadap Masyarakat

Tingkat Dampak	%
Positif	45%
Netral	30%
Negatif	25%

Survei ini menilai persepsi responden mengenai dampak kebijakan pemerintah terhadap masyarakat. Seperti yang diilustrasikan pada Tabel 2, temuan-temuan yang ada menyoroti sudut pandang yang beragam: Dampak Positif (45%): Hampir setengah dari responden menyatakan persepsi positif, yang mengindikasikan bahwa mereka percaya bahwa kebijakan pemerintah telah memberikan dampak positif terhadap masyarakat mereka. Dampak positif yang dirasakan umumnya berkisar pada perbaikan infrastruktur, inisiatif integrasi sosial, dan penciptaan peluang ekonomi yang dihasilkan dari kebijakan-kebijakan tersebut. Dampak Netral (30%): Sebagian besar responden (30%) mengambil sikap netral, yang menunjukkan bahwa mereka tidak merasakan dampak positif maupun negatif dari kebijakan pemerintah. Kategori ini menyiratkan sekelompok responden yang mungkin mengamati kebijakan-kebijakan tersebut namun tidak secara signifikan mengubah kehidupan sehari-hari mereka. Dampak Negatif (25%): Seperempat dari responden melaporkan adanya dampak negatif, yang mengungkapkan kekhawatiran terkait dengan meningkatnya persaingan untuk mendapatkan sumber daya, tekanan pada infrastruktur lokal, dan ketegangan budaya yang dirasakan sebagai akibat dari kehadiran pengungsi Rohingya.

Beragamnya perspektif mengenai dampak kebijakan pemerintah menggarisbawahi kompleksitas dalam mengelola krisis pengungsi Rohingya. Meskipun sebagian besar responden merasakan dampak positif, ada juga yang mengungkapkan kekhawatiran dan sentimen negatif. Keragaman ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pemerintah bergantung pada konteks dan dapat bervariasi di berbagai komunitas dan wilayah. Persepsi positif sejalan dengan potensi peningkatan infrastruktur, peluang ekonomi, dan integrasi sosial, yang mengindikasikan bahwa aspek-aspek tertentu dari kebijakan pemerintah diterima secara positif oleh masyarakat setempat. Namun, sentimen negatif menyoroti tantangan terkait alokasi sumber daya, integrasi budaya, dan dinamika masyarakat yang perlu diatasi untuk penyelesaian yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

4.3 Keterlibatan Masyarakat

Memahami tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan sangat penting untuk menilai efektivitas inisiatif pemerintah. Tabel 3 menguraikan tingkat keterlibatan masyarakat yang dilaporkan oleh para responden.

Tabel 3. Tingkat Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Kebijakan

Tingkat Keterlibatan	%
Tinggi	35%
Sedang	40%

Lemah	25%
-------	-----

Survei ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan. Tabel 3 mengilustrasikan beragam tingkat keterlibatan yang dilaporkan oleh para responden: Lebih dari sepertiga responden melaporkan tingkat keterlibatan yang tinggi, yang mengindikasikan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan upaya implementasi terkait dengan kebijakan pemerintah dalam menangani krisis pengungsi Rohingya. Segmen responden terbesar (40%) melaporkan tingkat keterlibatan yang sedang. Hal ini menunjukkan keterlibatan yang seimbang, di mana masyarakat diajak berkonsultasi, tetapi tingkat pengaruh mereka mungkin bervariasi berdasarkan kebijakan yang dimaksud. Seperempat dari responden mengindikasikan keterlibatan yang rendah, yang menunjukkan kekhawatiran tentang kurangnya keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan pemerintah dalam menangani krisis pengungsi Rohingya.

Temuan mengenai keterlibatan masyarakat menjelaskan sifat partisipatif dari proses kebijakan yang terkait dengan krisis pengungsi Rohingya. Proporsi besar responden yang melaporkan tingkat keterlibatan sedang hingga tinggi menunjukkan tingkat keterlibatan dalam pengambilan keputusan, yang mengindikasikan bahwa komunitas tertentu secara aktif berkontribusi dalam membentuk kebijakan.

4.4 Tantangan yang Dihadapi Pemerintah dan Masyarakat

Survei ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat lokal. Tabel 4 merangkum tantangan-tantangan yang dilaporkan oleh para responden.

Tabel 4. Tantangan yang Dihadapi Pemerintah dan Masyarakat

Tantangan	%
Pendanaan Pemerintah	40%
Kompleksitas Diplomatik	30%
Kebutuhan akan Kolaborasi Internasional	20%
Tekanan pada Sumber Daya Lokal	35%
Ketegangan Budaya yang di Persepsikan	25%
Peluang Ekonomi yang Terbatas	20%

Survei ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan tantangan yang dihadapi baik oleh pemerintah maupun masyarakat lokal. Kendala pendanaan disoroti sebagai tantangan utama yang dihadapi pemerintah dalam menangani krisis pengungsi Rohingya, menurut 40% responden. Kompleksitas diplomatik disebutkan oleh 30% responden sebagai tantangan yang signifikan, yang mengindikasikan rumitnya mengelola hubungan internasional dalam konteks krisis pengungsi. Seperlima dari responden menekankan perlunya peningkatan kolaborasi internasional untuk mengatasi tantangan yang ada secara efektif. Tekanan pada sumber daya lokal diidentifikasi sebagai tantangan utama yang dihadapi oleh komunitas lokal yang menampung pengungsi Rohingya, menurut mayoritas responden (35%). Ketegangan budaya yang dirasakan dilaporkan sebagai tantangan oleh 25% responden, yang menunjukkan kekhawatiran tentang integrasi budaya dan hidup berdampingan secara harmonis. Terbatasnya peluang ekonomi disoroti sebagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat lokal, menurut seperlima responden.

4.5 Analisis Perbandingan dengan Standar Internasional

Studi ini melakukan analisis komparatif untuk menilai keselarasan kebijakan negara Indonesia dengan standar internasional. Tabel 5 menyajikan temuan-temuannya.

Tabel 5. Analisis Perbandingan dengan Standar Internasional

Tantangan	%
Bantuan Kemanusiaan	80%
Kolaborasi dengan Int. Organisasi	65%
Tempat Penampungan Sementara	60%
Strategi Integrasi Jangka Panjang	55%
Struktur Tata Kelola yang Inklusif	35%
Sensitivitas Budaya dalam Kebijakan	30%

Temuan survei menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia selaras dengan standar internasional di beberapa bidang. Penyediaan bantuan kemanusiaan diakui oleh 80% responden, yang mencerminkan upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan mendesak para pengungsi. Kolaborasi dengan organisasi internasional diakui oleh 65% responden, menyoroti komitmen Indonesia untuk berbagi tanggung jawab dalam menangani krisis pengungsi Rohingya. Kebijakan pemerintah termasuk penyediaan tempat penampungan sementara, seperti yang diidentifikasi oleh 60% responden, selaras dengan praktik-praktik internasional untuk memastikan kebutuhan dasar dan keselamatan pengungsi. Namun, ada beberapa hal yang memerlukan perhatian dan perbaikan. Hanya 45% responden yang mengakui adanya strategi integrasi jangka panjang, yang mengindikasikan adanya kebutuhan untuk menyelaraskan kebijakan dengan standar internasional untuk solusi yang berkelanjutan. Struktur tata kelola yang inklusif diakui oleh 35% responden, yang menunjukkan perlunya peningkatan untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, sensitivitas budaya dalam kebijakan diidentifikasi oleh 30% responden, yang menekankan pentingnya mempertimbangkan pertimbangan budaya dalam inisiatif pemerintah.

4.6 Implikasi untuk Kebijakan dan Praktik

Pembahasan hasil penelitian ini mencakup implikasi terhadap kebijakan dan praktik. Temuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat tingkat kesadaran yang cukup tinggi mengenai kebijakan pemerintah, dampaknya terhadap masyarakat lokal bervariasi. Rekomendasi untuk intervensi yang ditargetkan untuk mengatasi masalah-masalah spesifik masyarakat sangat penting. Selain itu, meningkatkan keterlibatan masyarakat dan mengatasi tantangan yang teridentifikasi dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga mengenai kompleksitas seputar kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani krisis pengungsi Rohingya. Tingginya kesadaran di kalangan masyarakat menunjukkan adanya strategi komunikasi yang efektif, namun perspektif yang beragam mengenai dampak kebijakan menggarisbawahi bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada konteks. Tingkat keterlibatan masyarakat

menunjukkan adanya kebutuhan akan struktur tata kelola yang lebih inklusif. Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah, seperti kendala pendanaan dan kompleksitas diplomatik, dan oleh masyarakat, termasuk tekanan terhadap sumber daya dan ketegangan budaya, menggarisbawahi dinamika yang rumit dalam mengelola krisis pengungsi. Analisis komparatif dengan standar internasional menunjukkan adanya keselarasan di bidang-bidang tertentu dan perlunya perbaikan dalam strategi jangka panjang dan kepekaan budaya. Rekomendasi yang dihasilkan dari temuan-temuan tersebut menekankan pada intervensi yang tepat sasaran, peningkatan keterlibatan masyarakat, dan perbaikan dalam penyelarasan kebijakan. Penelitian ini berkontribusi pada wacana yang sedang berlangsung tentang manajemen pengungsi, memberikan wawasan berbasis bukti bagi para pembuat kebijakan, praktisi, dan akademisi yang terlibat dalam mengatasi tantangan kemanusiaan yang kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputera, Y., & Missbach, A. (2021). Indonesia's foreign policy regarding the forced displacement of Rohingya refugees: Muslim solidarity, humanitarianism, and non-interventionism. *Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law*, 22(1), 69–95.
- Bülbül, K., Islam, M. N., & Khan, M. S. (2022). *Rohingya Refugee Crisis in Myanmar: Ethnic Conflict and Resolution*. Springer Nature.
- Duran, K. L., Al-haddad, R., & Ahmed, S. (2023). Considering the shrinking physical, social, and psychological spaces of Rohingya refugees in Southeast Asia. *Wellbeing, Space and Society*, 100152.
- Fauzi, W., Solomon, R. V., & Prasojo, E. (2023). CHALLENGES IN IMPLEMENTING GOVERNANCE POLICIES FOR THE PROTECTION OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS. *International Journal of Innovative Technologies in Social Science*, 2 (38).
- Georgiou, T., Baillie, L., & Shah, R. (2023). Investigating Concerns of Security and Privacy Among Rohingya Refugees in Malaysia. *ArXiv Preprint ArXiv:2304.01617*.
- Haines, R., & Buchanan, C. (2023). The localisation discourse in post-2021 Myanmar: implications for conflict sensitivity. *Development in Practice*, 1–8.
- Höllermann, B. (2023). *Impact of interplay of perceived environmental and socio-political uncertainties on adaptation decisions*. Copernicus Meetings.
- Hospodaryk, V. (2023). Male and Gender-Diverse Victims of Sexual Violence in the Rohingya Genocide: The Selective Narrative of International Courts. *International Journal of Transitional Justice*, 17(2), 252–267.
- Hossain, M. P. (2023). Criminology of Atrocity Crimes: Analysing the Aetiology of the Rohingya Persecution in Myanmar. *International Annals of Criminology*, 61(1), 43–65.
- Irom, B. (2023). Visual themes and frames of the Rohingya crisis: newspaper content from three countries neighboring Myanmar. *Visual Communication*, 14703572231173076.
- Islam, M. S., & ŞAHİN, A. (2023). Impact of Forcibly Displaced People's Identity Crisis on Host State's Security: The Case of Rohingya Refugees in Bangladesh. *Saudi J. Humanities Soc Sci*, 8(4), 80–91.
- Lester, H., Ryakhovskaya, Y., & Olorunnisola, T. S. (2023). Asset-based community development approaches to resilience among refugees and recent migrant communities in Australia: a scoping review. *International Journal of Migration, Health and Social Care*.
- Loureiro, M., Joshi, A., Barnes, K., & Chaimite, E. (2023). Governance Diaries: An Approach to Researching Marginalized People's Lived Experiences in Difficult Settings. *International Journal of Qualitative Methods*, 22, 16094069221150106.
- Milhorance, C., Bursztyn, M., & Sabourin, E. (2022). Analysing complex policy problems: a critical

- review of the literature. *International Journal of Public Policy*, 16(2–4), 126–150.
- Nalini, S. N. L. (2021). Dampak Dampak covid-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(1), 662–669. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.278>
- Nilsen, M., Olney, J., Maung, K., Karim, L., Ahmad, S., Haque, N., & Mubarak, H. R. (2023). Community-Led Education among Rohingya Refugees and the Politics of Refugee Education in Bangladesh. *Journal of Refugee Studies*, 36(4), 712–735.
- Rachmat, A. N. (2022). Peluang Dan Tantangan Kepemimpinan Indonesia Dalam Bidang Politik-Keamanan Di ASEAN Pada Krisis Politik Myanmar Tahun 2021. *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 7(02), 180–200.
- Seftyono, C. (2022). *Kelindan Noise dan Voice menjadi Choice: Komunikasi Sains dalam Implementasi Kebijakan Berbasis Bukti Penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia*. Universitas Gadjah Mada.
- Shohel, M. M. C., Ashrafuzzaman, M., Babu, R., Akter, T., Tasnim, N., & Bayezid, A. (2023). Access to Higher Education for the Rohingya Refugees: Challenges, Opportunities, and Future Directions. *Global Perspectives on the Difficulties and Opportunities Faced by Migrant and Refugee Students in Higher Education*, 103–135.
- Suwandari, H. D., & Sugito, S. (2021). The Strategy of Indonesian Diplomacy Efforts and National Political Interests in the Ethnic Rohingya Refugee Conflict. *Indonesian Journal of Economics, Social, and Humanities*, 3(2), 131–143.
- Syahrin, M. A., Wiraputa, A. R., & Ponco Aji, K. (2022). Indonesian Legal Policy in Treating International Refugees Based on Human Rights Approach. *Law and Humanities Quarterly Reviews*, 1(4).
- Takemura, H. (2023). Background to the Rohingya Crisis. In *The Rohingya Crisis and the International Criminal Court* (pp. 11–26). Springer.
- Ullah, A. N. Z., Pratley, P., Islam, S., Islam, K., & Roy, T. (2023). Exploring Mental Health Status and Psychosocial Support among Rohingya Refugees in Bangladesh: A Qualitative Study. *Mental Illness*, 2023.
- Wicaksana, I. G. W., & Karim, M. F. (2022). Approaches to Indonesia's Foreign Policy: Area Studies, FPA Theory, and Global IR. *JAS (Journal of ASEAN Studies)*, 10(2).
- Wisasa, A. R., & Salam, R. (2023). Analysis of New Autonomous Regional Policies in Indonesia. *INFLUENCE: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE REVIEW*, 5(2), 297–314.